

BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan terbesar untuk pendapatan daerah masing-masing, karena itu sangat penting untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk mengetahui siapa yang menjadi Objek dan Subjek Pajak, pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bisa menentukan langsung siapa yang menjadi Objek dan Subjek Pajak yaitu selama ada orang atau kuasa yang mendapatkan manfaat dari Bumi dan Bangunan maka dia dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang banyak Wajib Pajak yang mengalami keluhan tentang terlalu besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang kepada Wajib Pajak, banyak wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana caranya untuk mengajukan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan penyelesaiannya, sementara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang membuat peraturan untuk Wajib pajak bisa mengajukan keberatan bayar pajak bumi dan bangunan hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melihat kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

1.2 SARAN

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang harus melakukan sosialisasi semua peraturan yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar Wajib Pajak mengerti apa yang diinginkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, jika Wajib Pajak mengetahui peraturan yang berlaku dengan jelas dan benar maka banyak masyarakat yang sadar betapa pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 1990. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: BPFE.
- Buku Saku Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- Buku Selayang Pandang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darwin, Drs, MBP. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Davey (1988:39-40). ada beberapa pemungutan tentang pajak daerah antara lain:
Diambil dari: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pajak-daerah.html>.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: PT Andi. Diambil dari: <http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2013/07/asas-asas-pemungutan-pajak-daerah.html>.
- _____. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: PT Andi
- _____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: PT Andi.
- Modul “SOSIALISASI PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB MENJADI q PAJAK DAERAH. 2011. Semarang.
- Moleong, L.J., 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Daerah Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan.

- Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- Prastowo A, Pohan., 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohman Abdul., W.J Langen. 2013. *Perpajakan Pendekatan Peraturan*. Semarang: Pustaka Magister.
- _____. 2013. *Perpajakan Pendekatan Peraturan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.ekonomi-kreatif.com/pengertian-pajak-daerah/.
- Zain, Mochammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zainal, Arifin. 2011. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.